BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dapat menggunakan dua metode yaitu menggunakan system peradilan dengan dasar hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dengan metode restorative justice Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penanganan Tindak Pidana Menggunakan restorative. Hal ini membuat suatu aturan yang telah jelas dalam penanganan tindak pidana khususnya pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakan hukum terkait pencemaran nama baik. fasilitas yang mendukung penegak hukum maka penindakan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Walaupun tidak dipungkiri, masih ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang untuk melakukan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam beberapa kasus yang ada di Polres Merangin beberapa di antaranya tidak dapat dibuktikan. Pelaku atau diduga pelaku yang melakukan pencemaran nama baik terkadang menggunakan akun palsu Dan belum bisa membuktikan terkait dengan kebenaran akun itu milik siapa. Selain itu Dapat dikatakan seharusnya pihak aparat penegak hukum

lebih melihat kepada SDM nya agak menghindari, dari aparat penegak hukum yang masih belum menguasai secara mendetail tentang bagaimana memaksimalkan fungsi dari kedua aturan tersebut, dengan melakukan beberapa seminar dan pelatihan tentang Undang-Undang terkait dengan Informasi Dan Transaksi Elektronik dan *restorative justice*.

B. Saran

1. Penulis menyarankan dengan semakin pesatnya kemajuan dari teknologi maka seharusnya lebih diperhatikan lagi penggunaan-penggunaan yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dikarenakan masih banyak pengguna-pengguna media sosial yang masih melakukan pelanggaran bahkan kejahatan melalui media social
2. Sarana dan pra-sarana yang menjadi kendala dalam menentukan pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial lebih dilengkapi lagi seperti penambahan alat pelacak *IP* Palsu atau akun palsu.